

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian di pedesaan telah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah dijalankan selama bertahun-tahun, namun hasil yang diharapkan masih belum tercapai secara maksimal. Salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di pedesaan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar. Hal ini menyebabkan menurunnya kreativitas dan inovasi masyarakat yang justru menjadi semakin bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga kemandirian masyarakat dalam mengelola dan menjalankan perekonomian menjadi terhambat (Mubyarto, 1991).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan ekonomi yang salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di pedesaan, karena peranannya yang penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Fauzi A, 2019).

Namun, UMKM di pedesaan saat ini menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta minimnya akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang semakin diperlukan di era modern ini (Asep Hamzah, 2022). Kendala-kendala ini menghambat pengembangan UMKM secara optimal, sehingga diperlukan upaya

lebih lanjut dari pemerintah dan pihak terkait untuk mendukung sektor ini agar mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa (Jefri & Ibrohim, 2021).

Dari tingkat jumlah UMKM yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan teknologi (Achmad et al., 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama di pedesaan. Peran UMKM sangat penting, tidak hanya dalam menciptakan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, tetapi juga dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang meliputi penciptaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aliyah, 2022).

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus diarahkan pada pemerataan, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan pembangunan di pedesaan sering kali menjadi perhatian utama, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa, dengan total lebih dari 72.000 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (A. Hutami Adhiningsih, 2015).

Potensi besar yang dimiliki oleh desa-desa ini, terutama melalui pengembangan UMKM, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa (Kartono & Nurcholis, 2016).

Dari segi manajemen, UMKM di Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Tantangan utama yang dihadapi sektor ini antara lain adalah keterbatasan dalam kemampuan manajemen, keterampilan, dan keahlian. Selain itu, banyak pelaku UMKM masih belum menguasai aspek-aspek penting seperti pemasaran, keuangan, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan yang intensif sangat diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional melalui UMKM (Hafsah, 2004).

Dalam menghadapi tantangan global dan tuntutan pasar yang semakin kompetitif, pembinaan UMKM harus lebih terfokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, serta akses pasar dan teknologi. Pemerintah bersama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta perlu memberikan dukungan yang memadai, termasuk akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan kewirausahaan, serta penggunaan teknologi yang mendukung efisiensi dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun internasional (Darfaz et al., 2023).

Dengan pengelolaan yang tepat, UMKM dapat menjadi ujung tombak dalam pembangunan ekonomi di pedesaan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal sangat penting untuk mendorong kemandirian ekonomi di pedesaan (Yolanda, 2024).

Masalah permodalan merupakan salah satu hambatan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sering kali, pelaku UMKM kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Proses pengajuan pinjaman di bank sering kali rumit dan

membutuhkan waktu yang lama, ditambah dengan syarat jaminan yang sulit dipenuhi serta bunga pinjaman yang relatif tinggi. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang terpaksa meminjam dari sumber tidak resmi seperti rentenir, yang justru meningkatkan risiko bagi kelangsungan usaha mereka. Keterlambatan pembayaran pinjaman dari bank atau rentenir akan menjadi beban berat bagi debitur, yang dapat menghambat perkembangan usaha dan membahayakan stabilitas keuangan mereka (Hafsah, 2004).

Dalam masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk membantu pelaku UMKM, terutama dalam hal akses permodalan. Salah satu program yang cukup menonjol adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki unit simpan pinjam. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat desa yang menjalankan usaha mikro. BUMDes bertindak sebagai lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa bersama pemerintah desa, sehingga mampu memberikan solusi permodalan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Moelana, 2023).

BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa dengan memberikan layanan pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk usaha mikro, penyediaan barang kebutuhan pokok, maupun layanan lain yang mendukung mobilitas dan sarana komunikasi desa. Dalam jangka panjang, pendirian dan pengembangan BUMDes bertujuan untuk menggerakkan roda berkelanjutan Sosialisasi dan Pembentukan perekonomian desa secara mandiri, memperkuat daya saing usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara BUMDes (Marini et al., 2023).

Desa Rambah Baru, yang terletak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten

Rokan Hulu, memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari. BUMDes ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dalam BUMDes Mekar Sari, terdapat beberapa unit usaha yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat desa dan pemerintah setempat (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Unit-unit usaha ini berfungsi untuk memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dan layanan yang dibutuhkan oleh warga desa. Melalui pengelolaan yang efektif dan partisipatif, BUMDes Mekar Sari diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan luar (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Pentingnya keberadaan BUMDes di Desa Rambah Baru tidak hanya terletak pada aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya unit usaha yang dikelola oleh masyarakat, diharapkan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi desa. Selain itu, BUMDes juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan (Data Observasi Peneliti, 2024).

Tabel 1. 1 Unit Usaha BUMDEs Mekar Sari Desa Rambah baru

No.	Jenis Usaha
1	Simpan Pinjam
2	Tabungan simpanan
3	Kredit barang

Sumber: Direktur BUMDes Mekar Sari , 2024

BUMDes Mekar Sari yang terletak di Desa Rambah Baru memiliki peran dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan berbagai unit usaha. Berdasarkan Data Tabel 1.1, terungkap bahwa BUMDes ini mengelola beberapa jenis unit usaha yang saling melengkapi, di antaranya unit usaha simpan pinjam yang menjadi salah satu andalan utama. Unit usaha simpan pinjam ini berfungsi untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami keterbatasan akses terhadap modal. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar pelaku UMKM di desa menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana dari lembaga keuangan formal, seperti bank (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Dalam waktu yang relatif singkat, pengurus dan pengelola BUMDes Mekar Sari telah berupaya secara proaktif dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui program simpan pinjam, BUMDes telah berhasil menyalurkan dana kepada pelaku UMKM di berbagai sektor, termasuk

perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, dan jasa. Dengan adanya dukungan finansial ini, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan produktivitas (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Keberadaan BUMDes ini sejalan dengan amanat pemerintah Indonesia yang mengharapkan setiap desa memiliki badan usaha yang dapat memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan UMKM. Pendirian BUMDes di berbagai desa diharapkan tidak hanya meningkatkan kemajuan ekonomi lokal tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun BUMDes Mekar Sari telah memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap pengelolaan, pelatihan manajerial, dan pemasaran produk agar dapat mengoptimalkan dampak positif terhadap perekonomian desa. Evaluasi dan analisis lebih mendalam mengenai kinerja dan efektivitas program simpan pinjam BUMDes sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan keberhasilan pelaku UMKM di Desa Rambah Baru (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Tabel 1. 2 Jumlah Masyarakat pelaku UMKM Di Desa Rambah Baru

No.	Tahun	Jumlah Pelaku UMKM
1.	2021	18
2.	2022	24
3.	2023	30
4.	2024	37
	Total	109

Sumber: BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru, 2024

Berdasarkan Data Tabel 1.2 terlihat adanya peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Rambah Baru setiap tahunnya. Kenaikan jumlah UMKM ini merupakan indikator positif dalam upaya menanggulangi pengangguran di wilayah tersebut. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Peningkatan jumlah UMKM di Desa Rambah Baru juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan potensi kewirausahaan yang dimiliki dan berani mengambil langkah untuk memulai usaha. Hal ini tidak lepas dari berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan dan

pembinaan bagi pelaku UMKM, termasuk pendirian BUMDes Mekar Sari yang menyediakan pinjaman modal dan fasilitas lainnya (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Meskipun terdapat tren positif dalam pertumbuhan UMKM, tantangan masih ada, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

**Tabel 1. 3 Jumlah Pelaku UMKM Simpan Pinjam BUMDEs Mekar Sari
Desa Rambah Baru Awal Tahun 2024**

No.	Bulan	Jumlah Anggota
1.	Januari	10
2.	Februari	15
3.	Maret	8
4.	April	8
5.	Mei	6
6.	juni	5
Jumlah		52

Sumber: Kantor BUMDes Mekar Sari (2024)

Berdasarkan Data Tabel 1.3 menunjukkan bahwa program simpan pinjam BUMDes Mekar Sari di Desa Rambah Baru mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak awal tahun 2024, khususnya dari bulan Januari hingga April, jumlah nasabah yang melakukan pinjaman mencapai 52 orang. Hal ini menandakan bahwa program simpan pinjam BUMDes Mekar Sari menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mereka (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Program simpan pinjam BUMDes Mekar Sari memiliki keunggulan dalam hal prosedur yang sederhana dan bunga yang relatif rendah, sehingga membuatnya lebih aksesibel bagi pelaku UMKM yang mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dengan

adanya kemudahan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya, tetapi juga merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki (Hasil Observasi Peneliti, 2024).

Tabel 1. 4 Pra Survey Peningkatan Usaha UMKM

No.	Peningkatan Usaha UMKM	Ya		Tidak	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Proses pengajuan modal di BUMDes Mekar Sari mudah dan membantu usaha kecil seperti saya dalam mendapatkan pinjaman.	3	60%	2	40%
2.	Dukungan dari BUMDes Mekar Sari memotivasi saya untuk membuat rencana jangka panjang dalam membangun usaha yang lebih kompetitif.	4	80%	1	20%
3.	Program Simpan Pinjam BUMDes Mekar Sari mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM di usaha saya.	4	80%	1	20%
4.	Program Simpan Pinjam BUMDes Mekar Sari membantu saya meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih baik	4	80%	1	20%
	Total	15	300%	5	100%

Sumber : Hasil Jawaban Kuisisioner Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil pra-survei yang tercantum dalam Tabel 1.4, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM merasakan manfaat dari program yang dijalankan oleh BUMDes Mekar Sari. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa proses pengajuan modal di BUMDes Mekar Sari tergolong mudah dan membantu usaha kecil dalam mendapatkan pinjaman. Selain itu, dukungan dari BUMDes ini juga memberikan motivasi bagi 80% responden untuk menyusun rencana jangka panjang dalam membangun usaha yang lebih kompetitif. Lebih lanjut, program Simpan Pinjam BUMDes Mekar Sari terbukti berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM di usaha UMKM, sebagaimana diakui oleh 80% responden. Selain itu, program ini juga

membantu 80% responden dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha mereka.

Namun, meskipun mayoritas responden merasakan manfaat dari program BUMDes Mekar Sari, masih terdapat sekitar 20–40% responden yang belum merasakan manfaat optimal, baik dalam kemudahan akses modal, pengelolaan keuangan, maupun peningkatan kompetensi SDM. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam efektivitas program BUMDes yang perlu diperhatikan, seperti kemungkinan adanya kendala administratif, kurangnya sosialisasi program, atau kesulitan dalam pemanfaatan fasilitas yang disediakan.

Dengan demikian, fenomena ini mengindikasikan adanya peluang untuk mengoptimalkan peran BUMDes Mekar Sari dalam mendukung perkembangan UMKM agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan menyeluruh (Hasil Observasi Peneliti, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDes Mekar Sari Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Rambah Baru.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh program simpan pinjam BUMDes terhadap kemajuan UMKM di desa serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program yang lebih efektif di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Program Simpan Pinjam Bumdes Mekar Sari Dalam Memberikan Manfaat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Rambah Baru?
2. Bagaimana Dampak Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Rambah Baru?
3. Bagaimana pengaruh pinjaman modal pada Program Simpan Pinjam BUMDes Mekar Sari terhadap peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat Desa Rambah Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kinerja Program Simpan Pinjam Bumdes Mekar Sari Dalam Memberikan Manfaat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Rambah Baru.
2. Untuk Mengetahui Dampak Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Rambah Baru.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaruh pinjaman modal pada Program Simpan Pinjam BUMDes Mekar Sari terhadap peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat Desa Rambah Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refresnsi mengenai penelitian yang berkaitan dengan peran BUMDes dalam kesejahteraan terhadap pelaku (UMKM) melalui program simpan pinjam.

b. Manfaat bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk mengetahui komitmen lembaga kemasyarakatan (BUMDes), agar dapat menentukan strategi atau program yang dapat membantu masyarakat.

c. Manfaat bagi penulis Selanjutnya

Memberikan manfaat mengimplementasikan ilmu manajemen yang terutama pengalaman dan penerapan atas teori yang telah dipelajari selama proses belajar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, penulis memaparkan sistematika dibawah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menerangkan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori pandangan, pernyataan, dan analisa pakar yang berkaitan dengan variable penelitian. Di jelaskan secara spesisik konsep

hubungan variable penelitian setelah melihat dari kajian-kajian teori yang ada. Dan jawaban tegas terhadap permasalahan penelitian berdasarkan kajian teori yang ditemukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dalam sebuah penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis data penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.1.1 Pengertian BUMDes

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka (6) tahun 2014 BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyetaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Dwiyanto (2017), BUMDES adalah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi. BUMDES dapat berbentuk perusahaan perseroan terbatas (PT) atau koperasi (Noho, 2017).

Dari pengertian BUMDES diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDES adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa. BUMDES dapat berupa berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, jasa, produksi, dan lain sebagainya.

Secara sederhana untuk memahami BUMDes, jika dipusat terdapat BUMN, maka di daerah terdapat BUMD, dan didesa terdapat BUMDes. Setelah BUMDes terbentuk, maka ada dua entitas (kelembagaan) yang ada di desa, yaitu pemerintah Desa dan BUMDes. Perlu dipahami bahwa Pemerintah Desa dan BUMDes merupakan dua kelembagaan yang berbeda. Secara keuangan, ada

pemisahan harta antara kekayaan Pemerintahan Desa dan BUMDes. Pengelola BUMDes bukan merupakan bagian dari perangkat desa, pengelola diserahkan kepada pihak yang memiliki kompetensi. Pengelola BUMDes merupakan orang yang profesional, memiliki keahlian dan jiwa kewirausahaan (Noveri, 2020).

2.1.1.2 Jenis Usaha Yang Dapat Dikembangkan BUMDes

Jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDES memang terus berkembang seiring waktu, mengikuti tren dan kebutuhan masyarakat desa.

Berikut ini beberapa jenis usaha yang populer sebagai berikut:

1. Usaha Perdagangan: Toko desa, warung makan, toko kelontong, agen pupuk dan pestisida, agen sembako.
2. Usaha Jasa: Sewa alat pertanian, jasa penggilingan padi, jasa transportasi, jasa laundry.
3. Usaha Produksi: Kerajinan tangan (anyaman, tenun, batik), pengolahan hasil pertanian (kopi, olahan ikan, keripik), produksi makanan ringan.
4. Usaha Pariwisata: Homestay, wisata alam, agro wisata, wisata kuliner.
5. Usaha Teknologi: Aplikasi desa, e-commerce desa, marketplace hasil pertanian, platform informasi desa.
6. Usaha Energi Terbarukan: Panel surya, biogas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
7. Usaha Pengolahan Sampah: Bank sampah, pengolahan kompos, pengolahan sampah organik.

2.1.2 Simpan Pinjam

2.1.2.1 Pengertian Simpan Pinjam

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), Simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman .

Menurut Achmad Sanusi (2008), Simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agus mulyono mengemukakan dalam bukunya bahwa simpan pinjam BUMDes adalah suatu program lembaga bukan bank yang memiliki kegiatan menerima simpanan dan pinjaman uang kepada seluruh anggota masyarakat pada daerah tertentu (Dimas Indra Kurniawan & Eddy Suprpto, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (TRI), di sebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan pelaku (UMKM) desa dengan memberikan pinjaman dan kredit yang mudah diakses (Elyana et al., 2023).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam BUMDes merupakan salah satu program yang kegiatannya melakukan penyimpanan dana serta memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa setempat.

2.1.2.2 Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam membangun perekonomian masyarakat, khususnya bagi yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Berikut adalah fungsi dan tujuannya:

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam sebagai berikut:

1. Mengirimkan Dana: Koperasi mengumpulkan dana dari anggota melalui simpanan. Dana ini kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.
2. Meningkatkan Akses Keuangan: Koperasi simpan pinjam memberikan akses bagi anggota yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal.
3. Memperkuat Ekonomi Lokal: Dengan membantu anggota dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan finansial, koperasi mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
4. Menumbuhkan Kerjasama: Koperasi simpan pinjam dibangun berdasarkan prinsip gotong royong dan kerjasama. Anggota saling mendukung dan membantu satu sama lain.
5. Mengembangkan Pendidikan Keuangan: Koperasi dapat memberikan edukasi dan pelatihan keuangan kepada anggota, sehingga meningkatkan literasi keuangan mereka.

2.1.2.3 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota: Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan adil.
2. Memperkuat Ekonomi Desa: Koperasi simpan pinjam dapat mendorong perekonomian desa dengan menyediakan modal bagi usaha kecil dan menengah di desa.
3. Menciptakan Lapangan Kerja: Dengan mendukung kegiatan ekonomi di desa, koperasi membuka peluang pekerjaan baru bagi warga desa.
4. Memperkuat Modal Sosial: Koperasi berperan dalam mempererat hubungan antar anggota dan membangun rasa kebersamaan di masyarakat.
5. Mengembangkan Kesadaran Berkoperasi: Koperasi simpan pinjam menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi di masyarakat.

2.1.2.4 Contoh Fungsi Dan Tujuan Dalam Koperasi Simpan Pinjam

1. Seorang petani membutuhkan modal untuk membeli pupuk dan bibit. Ia dapat meminjam dana dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah daripada bank.
2. Seorang ibu rumah tangga membutuhkan modal untuk memulai usaha warung makan. Koperasi menyediakan pinjaman untuk membantu mengembangkan usaha tersebut.
3. Koperasi mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi anggota. Pelatihan ini membantu anggota untuk mengelola keuangan pribadi dan usaha dengan lebih baik.

2.1.3 Pinjaman Modal

2.1.3.1 Pengertian Pinjaman Modal

Pinjaman modal merupakan pemberian pinjaman untuk keperluan modal usaha, atau untuk keperluan mendadak lainnya (Aspiranti, 2008). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), Pinjaman modal merupakan salah satu bentuk transaksi dalam sistem ekonomi Islam yang memungkinkan seseorang mendapatkan dana untuk membiayai kebutuhannya, baik untuk usaha maupun konsumtif. Pinjaman modal harus dilakukan dengan akad yang sesuai syariat Islam, seperti akad mudharabah atau musyarakah.

2.1.3.1.1 Pengertian Pinjaman

Menurut Suharyono (2004), Pinjaman adalah salah satu bentuk akses keuangan bagi masyarakat yang memerlukan dana tambahan untuk membiayai kebutuhan pribadi, keluarga, atau usaha. Pinjaman dapat diperoleh dari lembaga keuangan formal atau informal. (iqbal & widiya, 2018).

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2010), Pinjaman merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pinjaman yang diberikan kepada pengusaha dapat membantu mereka mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut astiko pinjaman merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati (Marini et al., 2023).

2.1.3.1.2 Pengertian Modal

Modal adalah sesuatu yang penting dan mendasar untuk memulai atau menjalankan sesuatu. Artinya, modal adalah sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Drs. Moekijat (2016) modal dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan dasar. Modal normalnya dianggap terdiri dari uang tunai, kredit, hak membuat, serta menjual sesuatu (berupa paten), mesin-mesin dan gedung-gedung, akan tetapi, sering juga istilah modal digunakan untuk menggambarkan hak milik total yang terdiri dari jumlah yang ditanam, surplus, dan keuntungan-keuntungan yang tidak dibagi (Moelana, 2023). Menurut bambang (dalam purwanti, 2012) modal merupakan faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan, besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.

Dari penjabaran pengertian pinjaman dan modal menurut para ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa pinjaman modal merupakan penggandaan modal atau barang-barang modal perusahaan yang dapat di kelola, yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara peminjam modal dan yang memberi pinjaman.

2.1.3.2 Indikator Pinjaman Modal Pada Program Simpan Pinjam Bumdes

Menurut Fery Tobing (2013) indikator yang mempengaruhi pinjaman modal pada program simpan pinjam bumdes dikelompokkan sebagai berikut:

a) Pemanfaatan Fasilitas Kredit

Lembaga keuangan memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur, bertujuan untuk memperkuat modal kerja bagi usaha yang dijalankan.

Kepatuhan nasabah dalam memanfaatkan fasilitas kredit yang telah diberikan cukup memberikan kelancaran dan kemajuan usahanya.

b) Aspek Jaminan Pinjaman (Kredit)

Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun adakalanya pihak bank atau yang memberi pinjaman membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank.

c) Pemenuhan Kewajiban

Penyediaan dana dalam rekening debitur. Dalam hal ini bukan hanya dalam kepatuhan pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga.

d) Kepribadian

Kepribadian calon debitur merupakan faktor yang paling utama dalam pemberian pinjaman. Kepercayaan yang diberikan bahwa debitur memiliki karakter dan moral yang baik.

2.1.4 Teori Tentang Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

2.1.4.1 Pengertian (UMKM)

Menurut Pusat Statistik (BPS), UMKM adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan / atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2,4 miliar per tahun. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sektor ekonomi yang memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat (Suci et al., 2017). .

Menurut Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, jumlah aset maksimal Rp.

50.000.000,- (Lima Pluh Juta Rupiah), jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yang memiliki keyakaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.

2.1.4.2 Klasifikasi UMKM

Klasifikasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia berdasarkan dua kriteria utama yaitu:

1. Kriteria Kekayaan Bersih:
 - a. Mikro: Kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
 - b. Kecil: Kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
 - c. Menengah: Kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
2. Kriteria Omset Tahunan:
 - a. Mikro: Omset tahunan paling banyak Rp300 juta.
 - b. Kecil: Omset tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar.
 - c. Menengah: Omset tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

2.1.4.3 Tantangan Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memang memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun, juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk bisa berkembang. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM sebagai berikut:

- a. Keterbatasan akses informasi
- b. Kesenjangan kesempatan dan perlakuan antara UMKM dan perusahaan besar
- c. Kurangnya dukungan dari pemerintah

- d. Bencana alam dan krisis ekonomi

2.1.4.4 Masalah Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Berikut beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM sebagai berikut:

1) Permodalan:

- a. Sulit akses modal: Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan formal karena persyaratan yang ketat, dokumen yang rumit, dan bunga yang tinggi.
- b. Keterbatasan modal: Banyak UMKM yang memiliki modal yang terbatas, sehingga sulit untuk melakukan ekspansi bisnis, memperbarui teknologi, atau menghadapi krisis ekonomi.

2) Manajemen:

- a. Keterampilan manajemen: Banyak pengusaha UMKM kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis, seperti perencanaan, keuangan, pemasaran, dan SDM.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia: UMKM sering kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk menjalankan operasional bisnis.

3) Pemasaran:

- a. Keterbatasan jangkauan pasar: Banyak UMKM yang terbatas dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan modal dan akses informasi.
- b. Sulit bersaing dalam pemasaran digital: Banyak UMKM yang belum memahami bagaimana memanfaatkan platform digital untuk

meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar.

4) Teknologi:

- a. Kesenjangan teknologi: Banyak UMKM yang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- b. Biaya teknologi: Investasi dalam teknologi seringkali terlalu mahal bagi UMKM.

5) Perizinan dan Birokrasi:

- a. Biaya perizinan: Proses perizinan yang rumit dan mahal menimbulkan beban bagi UMKM.
- b. Birokrasi yang rumit: Birokrasi yang rumit dan lamban menyulitkan

UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Usaha.

Suatu perusahaan akan mengalami peningkatan karena terdapat beberapa faktor, yaitu karakteristik wirausahawan, modal usaha dan strategi pemasaran (Purwanti, 2012). Menurut HENDRO, terdapat 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha yaitu:

- a. Faktor Peluang.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM).
- c. Keuangan dan Adminitrasi.
- d. Organisasi.
- e. Perencanaan.
- f. Pengelolaan Usaha.
- g. Pemasaran dan Penjualan
- h. Bantuan Pemerintah.

Menurut Djoko (dalam penelitian pariye, 2019), peningkatan usaha adalah dengan memperkuat modal kerja dan juga memperbanyak cabang usaha pembantu.

2.1.5.1 Indikator Peningkatan Usaha UMKM

Menurut Anoraga (2007 ; 129) adapun indikator-indikator pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan Modal (*financial*)
- b) Strategi Pembangunan Usaha (*Business Development*)
- c) Potensi Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)
- d) Kemampuan Pengelolaan (*Managemen Capabilities*)

Indikator yang diadopsi Inggarwati dan Kaudin (2010) mengatakan bahwa untuk mengukur tingkat pertumbuhan usaha ialah dengan melihat peningkatan pendapatannya, bertambahnya karyawan dan indikator keuangan. Menurut Mohammad Soleh pertumbuhan usaha dapat diukur dengan melihat bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian yang sedang diteliti , mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada, dan membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, peneliti akan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Irene Vielgia Noveri (2021)	Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDes Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Noveri, 2020)	Pinjaman Modal, Program Simpan Pinjam, Peningkatan UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara pinjaman modal pada program simpan pinjam BUMDes Mahmud Marzuki terhadap peningkatan UMKM Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota sebesar 15% hanya pada taraf signifikan 5% sedangkan 85% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pinjaman modal pada program simpan pinjam BUMDes Mahmud Marzuki terhadap peningkatan UMKM Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota.

				Ditinjau menurut ekonomi syariah, pinjaman modal pada program simpan pinjam BUMDes ternyata sudah sesuai, yaitu bertujuan memberikan kemaslahatan, namun operasionalnya masih memakai sistem bunga
2.	FIHA FAQIHA' 2021	PENGARUH PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNIT SIMPAN PINJAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA HARJOSARI KIDUL KECAMATAN ADIWERN KABUPATEN TEGAL (FIHA FAQIHATUN, 2021)	BUMDES, Simpan Pinjam, Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,371 dan nilai ttabel sebesar 1,677. Karena nilai thitung sebesar $5,371 > \text{ttabel}$ sebesar 1,677 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa BUMDES simpan pinjam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
3.	Dimas Indra Kurniawan 2017	Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong	Pinjaman Modal, Pendapatan UMKM, Koperasi Simpan Pinjam, paired t-test	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan sebelum dengan tingkat pendapatan sesudah adanya pinjaman modal dari

		Kabupaten Sidoarjo) (Dimas Indra Kurniawan & Eddy Suprpto, 2017)		Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo. Pengusaha UMKM dimasing-masing tingkat pendapatan mengalami kenaikan pendapatan meski sangat kecil yaitu berkisar antara satu hingga tujuh persen. Hubungan antara dua kondisi yakni kondisi sebelum dan sesudah pemberian treatment sangat kuat dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pengusaha UMKM anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo erat kaitannya dengan pemberian pinjaman modal dari koperasi.
4.	Selfianur. Baharuddin Ballutaris 2021	PENGARUH BADA USAHA MILIK DESA SUMBER REJEKI UNIT SIMPAN PINJAM TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PETTUKU KEC. BONTOCANI	BUMDES, Simpan Pinjam, Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan hipotesis pertama sebelum adanya BUMDES tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maka Ho ditolak. Adapun hipotesis kedua setelah

		KAB. BONE (Selfianur & Ballutaris, 2021)		adanya BUMDES terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka Ha diterima. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan sekaligus evaluasi kinerja pemerintah dan masyarakat Desa Pattuku, serta membuka BUMDES selain simpan pinjam. Sehingga, Tingkat kesejahteraan masyarakat Pattuku tidak hanya dipengaruhi jenis usaha simpan pinjam tetapi ada jenis usaha yang lain seperti bisnis sosial, usaha bersama, maupun bisnis penyewaan.
5.	Windiani1 , Abdullah , Sani2 Asmawarna Sinaga3	ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SANGGA LIMA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT	Bumdes, Kesejahteraan Masyarakat.	Hasil penelitian menjelaskan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat periode tahun 2021- 2022 yaitu melaksanakan berbagai kegiatan seperti dana pinjaman usaha, memberikan seminar, pelatihan,

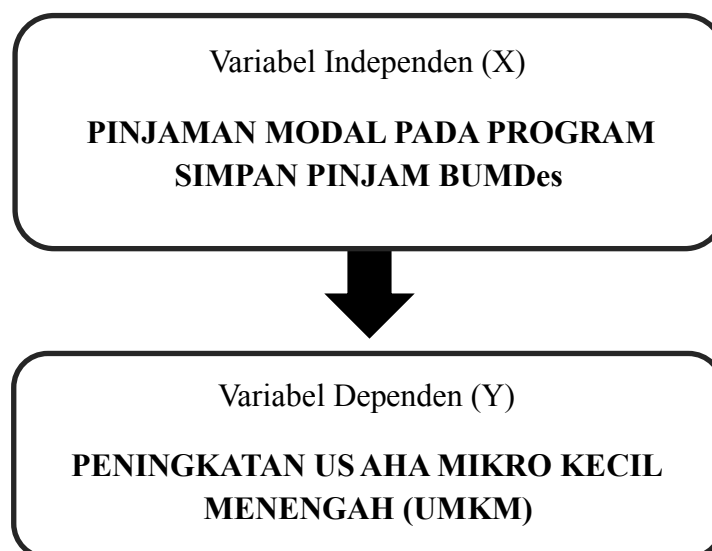
		PERIODE TAHUN 2021-2022 (Windiani et al., 2022)		dan konsultasi dalam mengelola usaha. Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat periode tahun 2021-2022 berpengaruh terhadap kesejahteraan kepada masyarakat dan mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDES. Terjadi peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Periode Tahun 20212022 yang dilihat dari berbagai indikator seperti menambah pendapatan masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, maupun kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal, kesehatan keluarga dan
--	--	---	--	--

				kebutuhan akan pendidikan anak-anak mereka.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Dari Beberapa Penelitian Sebelumnya, 2024

2.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BUMDes Mekar Sari terhadap peningkatan UMKM masyarakat Desa Rambah Baru melalui pinjaman modal pada program simpan pinjam. Menurut Natoatmodjo (2018), kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variable yang di teliti. Adapun model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual

Sumber : Buku “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Simpan Pinjam, 2024”

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti atas permasalahan penelitian setelah mengkaji dari kajian teori. Hipotesis di ungkapkan dengan jawaban tegas atas permasalahan penelitian. Hipotesis juga bias dipahami sebagai tentatif tentang hubungan antara beberapa variable atau lebih. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Pinjaman modal pada program simpan pinjam BUMDes Mekar Sari berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha (UMKM) masyarakat Desa Rambah Baru”.